

ANALISIS MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM KONTEKS DEMOKRASI BERDASAR KEDAULATAN RAKYAT SERTA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Rahma Salmiarti¹, Madinatul Zahra², Sasmi Nelwati³
salmiartirahma@gmail.com¹, madinatulzahra7@gmail.com², sasminelwati@uinib.ac.id³
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ABSTRAK

Musyawarah, secara etimologis berasal dari kata Arab syura yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, telah berkembang mencakup proses pengambilan pendapat melalui diskusi. Ini tidak hanya mengacu pada pengambilan suatu hal dari orang lain tetapi juga mencakup diskusi berbagai perkara yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan pustaka dari buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan analisis musyawarah mufakat dalam konteks demokrasi berdasar kedaulatan rakyat serta hak dan kewajiban warga Negara dan untuk memperoleh bahan-bahan tentang berbagai teori yang penting dari sudut pandang topik penelitian. Peneliti juga menggunakan teknik analisis mengumpulkan literatur Hak dan kewajiban saling bergantung dan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tetap terjaga keseimbangannya dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memenuhi peranannya sebagai warga negara dan mendapat pengakuan atas hak-haknya sesuai dengan pelaksanaan tugasnya rahim. Semua yang kamu punya. Ketika hak dan kewajiban tidak berfungsi secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari, Di Indonesia, musyawarah memastikan semua suara didengar sesuai dengan prinsip Hukum Pancasila, keputusan harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara bersifat timbal balik dan harus seimbang untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Pasal 27-34 UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban ini. Kesetaraan hak warga negara penting untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

Kata kunci: Musyawarah mufakat, demokrasi, hak dan kewajiban warga Negara

Abstract

Musyawarah, etymologically derived from the Arabic word shura which means taking honey out of the hive, has developed to include the process of taking opinions through discussion. It not only refers to the taking of a matter from another person but also includes the discussion of various matters that are important in daily life, both within the scope of family, community, and in the life of the nation and state. The method of this research is to use the library research method to collect library materials from books, magazines, and others related to the analysis of consensus deliberation in the context of democracy based on popular sovereignty and the rights and obligations of citizens and to obtain materials on various theories that are important from the point of view of the research topic. Researchers also use the analysis technique of collecting literature Rights and obligations are interdependent and must be carried out in such a way as to maintain their balance in everyday life. Obligations are things that must be fulfilled by a person in order to fulfill his role as a citizen and receive recognition for his rights in accordance with the performance of his duties in the womb. Everything you have. When rights and obligations do not function harmoniously in daily life, In Indonesia, deliberation ensures all voices are heard in accordance with the principles of Pancasila Law, decisions must be accountable to God and

society. The rights and obligations of citizens are reciprocal and must be balanced to maintain social order and justice. Articles 27-34 of the 1945 Constitution regulate these rights and obligations. Equality of citizens' rights is important to avoid social jealousy and maintain harmony in society.

Keywords: *Consensus, democracy, rights and duties of citizens*

PENDAHULUAN

Musyawarah, secara etimologis berasal dari kata Arab syura yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, telah berkembang mencakup proses pengambilan pendapat melalui diskusi. Ini tidak hanya mengacu pada pengambilan suatu hal dari orang lain tetapi juga mencakup diskusi berbagai perkara yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Majid, 2020). Musyawarah merupakan sarana untuk menemukan dan mengumpulkan kebenaran suatu pendapat melalui dialog ilmiah, memberikan peluang bagi peserta untuk berargumentasi berdasarkan ilmu pengetahuan. Hal ini membuat musyawarah menjadi penting sebagai tameng bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan dan pemikiran mereka, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemimpin (Muhammad Hanafi, 2013).

Dalam konteks Indonesia, musyawarah mencerminkan prinsip Hukum Pancasila yang memastikan seluruh suara, baik dari suku minoritas maupun mayoritas, didengar dan dipertimbangkan secara setara. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa serta seluruh masyarakat Indonesia, menciptakan landasan moral dan sosial yang kuat (Nur et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya penting dalam menjaga kesetaraan tetapi juga dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi potensi konflik, dan mempromosikan harmoni sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kebersamaan dan keadilan sosial.

Hak dan kewajiban warga negara di Indonesia bersifat timbal balik dan saling bergantung, seperti yang diatur dalam Pasal 27-34 UUD 1945. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Hak-hak warga negara seperti perlindungan hukum, pekerjaan yang layak, pendidikan, kebebasan beragama, dan kebebasan berserikat harus dipenuhi untuk memastikan kesetaraan dalam masyarakat. Sebaliknya, kewajiban warga negara seperti mematuhi hukum dan membela negara juga harus dilaksanakan untuk menjaga kestabilan dan kemakmuran bangsa (Sinaga et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan pustaka dari buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan analisis musyawarah mufakat dalam konteks demokrasi berdasar kedaulatan rakyat serta hak dan kewajiban warga Negara dan untuk memperoleh bahan-bahan tentang berbagai teori yang penting dari sudut pandang topik penelitian. Peneliti juga menggunakan teknik analisis, yaitu analisis bahan sumber yang diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur yang diperoleh sebelumnya. Dengan cara ini akan membantu peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan, dalam menyusun artikel ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, musyawarah merupakan terjemahan dari kata Arab syura yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya. Kata tersebut kemudian berkembang mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau diambil dari orang lain, termasuk ungkapan suatu pendapat. Ini juga berarti mendiskusikan berbagai perkara yang dimusyawarahkan (Majid, 2020). Musyawarah merupakan satu hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun lingkup yang lebih besar yaitu hidup berbangsa dan bernegara (Mubarok, 2019).

Musyawarah sebagai sistem penyelesaian hukum merupakan peluang untuk menemukan dan mengumpulkan kebenaran suatu pendapat melalui diskusi ilmiah. Metode ini memberikan peluang yang sangat baik bagi peserta untuk melakukan dialog berdasarkan argumentasi ilmiah. Musyawarah memegang peranan penting sebagai tameng bagi masyarakat. Karena musyawarah merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan dan pemikirannya, maka musyawarah dapat mencegah tindakan sewenang-wenang pemimpin dan menjauhkan pemimpin dari kecenderungan menjadi sagat (pelanggar batas) dan melakukan perbuatan zalim (Muhammad Hanafi, 2013).

Musyawarah dan mufakat dalam masyarakat merupakan wujud kemauan bangsa, memastikan seluruh suara dan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia diperlakukan secara setara, baik dari suku, minoritas atau mayoritas, subordinat atau mayoritas. Tingginya status ekonomi Indonesia beserta pendapat dan tuntutan akan didengarkan untuk diwujudkan demi kepentingan umum. Sesuai dengan kaidah Hukum Pancasila, segala hasil pembuatan dan pertimbangan undang-undang mengenai penerapan dan pelaksanaan undang-undang di Indonesia adalah pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa serta negara dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Nur et al., 2021).

Hak warga negara merupakan wujud hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Dengan kata lain warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara, dan sebaliknya negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Hak adalah kekuasaan untuk memperoleh sesuatu yang harus diakui oleh pihak tertentu dan tidak dapat direalisasikan oleh pihak lain, serta pada prinsipnya dapat diminta secara paksa dari pihak tersebut. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban untuk memberi atau melakukan sesuatu yang wajib diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu dan pada prinsipnya dapat dilakukan secara paksa oleh pihak tertentu. Keseimbangan hak dan kewajiban yang berkaitan penting bagi ketertiban sosial, keadilan, dan masyarakat (Mahardika et al., 2023).

Hak orang lain berkaitan dengan kewajiban masing-masing individu, begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa agar suatu hak dapat dianggap sebagai hak yang sebenarnya, maka hak tersebut harus relevan. Suatu hak tanpa kewajiban yang menyertainya tidak layak menyandang nama ini. Pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan hak asasi manusia dan kewajiban pokok serta mengatur hak dan kewajiban negara kesatuan dan warga negaranya. Hak dan kewajiban tersebut diatur secara luas dan dijelaskan dengan undang-undang (Sinaga et al., 2024). Karena hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, maka "teori korelasi" yang dianut oleh kaum utilitarian menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban saling bergantung dan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tetap terjaga keseimbangannya dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memenuhi peranannya sebagai

warga negara dan mendapat pengakuan atas hak-haknya sesuai dengan pelaksanaan tugasnya rahim. Semua yang kamu punya. Ketika hak dan kewajiban tidak berfungsi secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari, maka timbullah perbandingan dan timbullah keresahan sosial dalam pengelolaan kehidupan individu dalam masyarakat, bernegara, dan bernegara.

Hubungan hak dan kewajiban terhadap negara sendiri. Dalam konteks Indonesia, istilah “warga negara” (berdasarkan Pasal 26 UUD 1945) mengacu pada masyarakat lokal Indonesia dan negara lain yang sah sebagai warga negara menurut undang-undang. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah seseorang yang menjadi warga negara Republik Indonesia berdasarkan suatu undang-undang, perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945. negara bagian. Oleh karena itu, asas kewarganegaraan adalah bahwa anggota suatu bangsa mempunyai tanggung jawab satu sama lain dan terhadap negaranya sendiri. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kekuasaan untuk menentukan prinsip-prinsip kewarganegaraan bagi individu (Ushuluddin et al., 1999).

Semua warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Kesetaraan antar manusia akan selalu dijaga untuk menghindari kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Berikut ini contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia:

- a. Semua warga negara berhak atas perlindungan hukum.
- b. Semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
- d. Semua warga negara mempunyai kebebasan untuk memilih, menganut, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya.
- e. Semua warga negara mempunyai hak atas pendidikan dan bimbingan.
- f. Setiap warga negara berhak mempertahankan Indonesia atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh.

Semua warga negara mempunyai hak yang sama atas kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berekspresi lisan dan tertulis, sesuai dengan hukum yang berlaku (c. flores, 2019).

Dalam konteks Indonesia, musyawarah menjadi elemen penting yang mencerminkan prinsip Hukum Pancasila. Proses ini memastikan bahwa semua suara, termasuk dari minoritas, didengar dan dipertimbangkan secara setara. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan seluruh masyarakat, menciptakan landasan moral dan sosial yang kuat.

Musyawarah di Indonesia juga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, musyawarah membantu meredam potensi konflik dan mempromosikan harmoni sosial. Ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kebersamaan dan keadilan sosial

Hak dan kewajiban warga negara di Indonesia bersifat timbal balik, saling bergantung, dan harus dijaga keseimbangannya untuk memelihara ketertiban sosial dan keadilan. Pasal 27-34 UUD 1945 secara khusus mengatur hak dan kewajiban ini, memberikan landasan hukum yang jelas. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini esensial dalam mencegah ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Hak-hak warga negara, seperti perlindungan hukum, pekerjaan yang layak, pendidikan, kebebasan beragama, dan kebebasan berserikat, harus dipenuhi untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam

masyarakat. Sebaliknya, kewajiban warga negara, seperti mematuhi hukum dan membela negara, juga harus dilaksanakan untuk menjaga kestabilan dan kemakmuran bangsa

KESIMPULAN

Musyawarah, yang berasal dari kata Arab syura, adalah proses mengambil pendapat melalui diskusi dan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Ini berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan dan pemikiran mereka, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemimpin. Di Indonesia, musyawarah memastikan semua suara didengar sesuai dengan prinsip Hukum Pancasila, dan keputusan harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara bersifat timbal balik dan harus seimbang untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Pasal 27-34 UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban ini. Kesetaraan hak warga negara penting untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- c. flores. (2019). No TitleEAENH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Mahardika, I. K., Handon, S., Ernasari, Rofida, H. A., Zahro, F., & Seftiyani, M. A. (2023). *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif. Hakikat Fisika Sebagai Pilar Kehidupan*, 7(12), 30–34.
- Majid, Z. A. (2020). Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Hikmah Journal of Islamic Studies*, 15(2), 141. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>
- Mubarok, A. A. (2019). Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>
- Muhammad Hanafi. (2013). Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 227–246.
- Nur, ifani chairunnisa, Jayus, & Nurul, laili fadilah. (2021). *PUSKAPSI Law Review* (2021) Diterbitkan oleh PUSKAPSI FH UNEJ Tersedia secara online, Mei, 2021.
- Sinaga, D. S., Situmorang, J., & Weking, V. E. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2(6), 230–233.
- Ushuluddin, D., Ui, A., Maulana, N. S., & Banten, H. (1999). *Prodi Ilmu Hadis*. 3.